

BAB 2

POLITIK LUAR NEGERI JOKO WIDODO PERIODE 2014-2019

Pada bab ini akan menjelaskan secara luas politik luar negeri Joko Widodo di periode pertama dan visi dari PMD. Bab ini akan menjadi landasan untuk nantinya akan digunakan mengevaluasi apakah konsep yang dicanangkan pada periode Jokowi sesuai dengan pelaksanaan selama periode kepemimpinannya.

Bab ini terdiri dari 3 subbab dan kesimpulan. Subbab pertama akan membahas mengenai politik luar negeri Joko Widodo secara umum, dimulai dari keamanan dan perdamaian, diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara, kerja sama ASEAN dan diplomasi maritim. Subbab kedua akan khusus membahas mengenai gagasan PMD. Subbab ketiga akan membahas mengenai diplomasi maritim sebagai cara yang digunakan untuk mencapai PMD.

2.1 Politik Luar Negeri Joko Widodo

Politik luar negeri merupakan sebuah sistem berupa tindakan suatu negara dan bertujuan untuk merubah perilaku negara lain demi mencapai kepentingan negaranya sendiri (Modelska, 1962). Hal ini merupakan suatu sikap politis dari sebuah negara. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang terpilih pada periode pertama tahun 2014-2019 memiliki arah kebijakan luar negeri yang terfokus pada lima pilar utama. Pilar pertama adalah keamanan dan perdamaian. Kedua adalah diplomasi ekonomi. Ketiga adalah perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Keempat adalah kerja sama *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). Sedangkan pilar terakhir adalah diplomasi maritim untuk mencapai gagasan besarnya menjadikan Indonesia sebagai PMD. Melihat arah kebijakan luar negeri Jokowi tersebut banyak pendapat menganggap bahwa politik luar negeri Joko Widodo adalah kedalam atau *inward looking*. Berbeda dengan arah kebijakan politik luar negeri Presiden sebelumnya, politik luar negeri Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sangat tertarik dengan dunia internasional dibuktikan dengan slogan politik luar negerinya yaitu, *zero enemies million friends* dianggap lebih ke luar atau *outward looking*, sedangkan periode Jokowi justru membawa agenda yang

ditulis seakan-akan lebih banyak mementingkan kepentingan domestik, dimana Indonesia lebih memilih untuk membangun dan menguntungkan domestik dibandingkan berperan melalui aktivitas multilateral di tingkat global. Meski begitu politik luar negeri Jokowi tetap berupaya melihat Indonesia sebagai negara *middle power*¹.

Sebelum pembahasan mengenai lima pilar kebijakan luar negeri Jokowi, ada satu hal yang menarik dalam era kepemimpinannya, yaitu anggapan bahwa Indonesia terkesan cenderung berpihak pada Tiongkok dan menjauhi Amerika Serikat. Hal ini muncul ketika adanya pembangunan infrastruktur yang dibantu oleh Tiongkok dan kerap sekali diisukan bahwa Indonesia nantinya akan bisa menjadi korban *China Debt-Trap*. Meski begitu Indonesia-Tiongkok merupakan mitra bisnis yang sudah terjalin selama bertahun-tahun, hubungan baik itu juga tentu diimbangi kewaspadaan Indonesia terhadap kebangkitan Tiongkok terkait isu Kawasan Laut Cina Selatan, Perang Dagangnya dengan AS, atau Program *China Belt Road* yang telah digaung-gaungkan beberapa tahun terakhir. Pesatnya perkembangan Tiongkok tentu menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia terutama di kawasan Asia-Pasifik. Maka dari itu ketika ada bentuk kerja sama antara kedua negara namun disisi lain Tiongkok dianggap ancaman bagi Indonesia, tentu kecenderungan Indonesia ke Tiongkok bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Strategi yang digunakan Indonesia adalah *hedging*, yaitu berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan tujuan keuntungan ekonomi namun tetap memberikan jarak sehingga interdependensi masih terjamin (Rosyidin, 2019). Sehingga, kedekatan dan hubungan yang dilakukan Indonesia-Tiongkok hanyalah sebatas kepentingan ekonomi negara, sedangkan di sisi lain ketegasan dan kebijakan sebagai negara yang berdaulat serta menganggap Tiongkok sebagai sebuah ancaman negara tetap dijalankan.

¹ Negara posisi menengah dengan beberapa indikator; populasi, wilayah geografis, pengeluaran militer, GDP, pertumbuhan riil GDP, nilai ekspor, GNI per kapita, persentase perdagangan dan angka harapan hidup.

2.1.1. Keamanan dan Perdamaian

Jokowi mengklaim bahwa pada masa kepemimpinannya Indonesia akan terus berkontribusi pada perdamaian dunia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kunjungan perdamaian dan bantuan kemanusiaan yang terus diberikan kepada negara-negara yang terus didera konflik. Secara internasional, diplomasi perdamaian bertujuan untuk meningkatkan citra Indonesia sebagai mediator internasional, sedangkan dalam lingkup kawasan, diplomasi perdamaian digunakan untuk mempertahankan sentralitas dan persatuan ASEAN (CSIS, 2019). Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia tidak kemudian melupakan aspek etis dalam hubungan internasional. Aspek etis yang dimaksud nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas dan kepantasan (Rosyidin, 2019). Aspek ini dilaksanakan Indonesia berlandaskan dengan konstitusi yaitu untuk memberikan peran aktifnya dalam menciptakan ketertiban dunia yang merdeka, damai, dan adil.

Pada 2018 Jokowi mengunjungi Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan melakukan diplomasi damai. Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam melakukan upaya perdamaian untuk Palestina, salah satu tindakannya adalah penolakan terhadap pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, mendesak PBB untuk melaksanakan prinsip demokrasi dari hasil voting terhadap status quo Israel, memberikan dukungan secara tegas terhadap Palestina dalam forum *OIC Extraordinary Summit* di Istanbul, dan memberikan pembebasan biaya masuk kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia sehingga akan meningkatkan keuntungan Palestina. Tidak hanya Palestina, Indonesia juga mendorong terwujudnya rekonsiliasi di Afghanistan. Indonesia juga memberikan bantuan beasiswa pelatihan polisi, biaya pembangunan infrastruktur, pertukaran tokoh agama, dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Sebagai pemegang identitas negara muslim terbesar, Indonesia juga memberikan kontribusinya pada konflik Arab Saudi-Iran. Indonesia berperan sebagai mediator kedua negara, karena dengan terciptanya perdamaian maka terwujudnya menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan. Di Asean, Indonesia juga turut melakukan diplomasi damai terkait konflik Rohingya

di Myanmar. Indonesia memberikan bantuan obat-obatan, makanan, dan membangun rumah sakit di Rakhine untuk mengarasi krisis kemanusiaan di Myanmar. Selain pemberian bantuan, hingga tercatat pada tahun 2015 ada sebanyak 11.941 pengungsi yang sudah ditampung. Bantuan diberikan berupa tempat penampungan, makanan, dan obat-obatan.

Bantuan kemanusiaan dan diplomasi damai yang diserukan Indonesia dibuktikan juga dengan terpilihnya Indonesia menjadi Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Tercatat Indonesia telah mengirimkan total 2.965 *peacekeeper* untuk bertugas pada 9 misi perdamaian dunia, dan menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ke-8 dalam mengirim pasukan perdamaian di daerah konflik. Hal ini tentu memperkuat bukti bahwa pada kepemimpinan Joko Widodo Indonesia berperan aktif untuk perdamaian dan kemanusiaan.

2.1.2. Diplomasi Ekonomi

Selain upaya keamanan dan perdamaian, pada era kepemimpinan Jokowi Indonesia juga menerapkan diplomasi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan, memperkuat, dan meningkatkan perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Diplomasi ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diplomasi ini tentu dijadikan sebagai prioritas utama bagi hampir seluruh negara di dunia (Bayne & Woolcock, 2011). Di tahun 2014, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyampaikan bahwa terdapat 4 pilar yang tercantum dalam diplomasi ekonomi, yaitu, memperluas dan meningkatkan akses pasar produk Indonesia, memaksimalkan kapasitas dan sumber daya perwakilan RI di pasar non-tradisional, meningkatkan investasi asing pada sektor prioritas Indonesia dan memberikan perlindungan investasi Indonesia di luar negeri, serta memanfaatkan fungsi *Asean Economic Community* (AEC) secara maksimal (Antara, 2014). Fokus utama dalam diplomasi ekonomi Indonesia adalah meningkatkan kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata atau *Trade, Tourism, Investment* (TTI) dengan tujuan untuk mendorong ekspor Indonesia, meningkatkan investasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan, sehingga meningkatkan perekonomian nasional. Tidak heran jika pada masa kepemimpinan Jokowi dianggap terlalu

membuka investor asing dan melakukan banyak kerja sama antar negara. Salah satunya adalah kerjasama antara Indonesia-Belanda. Melalui praktik diplomasi ekonomi diharapkan adanya perubahan neraca perdagangan menjadi positif dan ada peningkatan terhadap investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI). Dari tingkat promosi *TTI*, terdapat 37 pertemuan dan perundingan untuk mencapai peningkatan investasi, ekspor, dan promosi pariwisata, antara lain, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Demi meningkatnya sektor pariwisata, Kemlu memberikan fasilitas bebas visa kunjungan singkat untuk 75 negara di dunia (Kemlu, 2015).

Diplomasi ekonomi juga bertujuan untuk mendorong ekspor, kerjasama dengan BUMN, serta mendorong ekonomi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Tercatat bahwa, minyak sawit (19,16 persen), kopra (11,31 persen), dan asam lemak monokarboksilat (10,69 persen) menjadi komoditas utama Indonesia-Belanda, dan menjadikan Belanda sebagai negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagi Indonesia. Sedengkn, realisasi investasi sektor riil Belanda di Indonesia pada tahun 2019 mencapai sebesar US\$ 2,5 miliar untuk 11.040 proyek. Dari sektor pariwisata, jumlah wisatawan Belanda ke Indonesia pada 2019 sebanyak 215.287 orang. Dengan angka tersebut, Belanda menempati urutan ke-4 terbesar wisatawan dari Eropa dan ke-16 dari seluruh dunia. Indonesia juga mengembangkan ekspor bahan mentah menjadi barang jadi, hal ini merupakan upaya untuk mendorong ekonomi 4.0 meliputi industri digital, ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya alam. Sehingga diharapkan upaya tersebut mampu memberikan peningkatan bagi industri Indonesia, dan membuka akses bagi kelompok menengah ke bawah ke pasar internasional (CNBC, 2019). Kondisi ekonomi Indonesia juga stabil pada titik 5 persen, menjadi salah satu yang terbaik pada G20, dan diikuti dengan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, dimana untuk pertama kalinya angka kemiskinan Indonesia turun hingga mencapai level satu digit (CSIS, 2019). Pada akhirnya Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, daya saing, serta kemandirian dan kebangkitan sektor-sektor

strategis bagi seluruh masyarakat Indonesia dan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama.

2.1.3. Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia

Salah satu isu yang dicanangkan pada kepemimpinan Joko Widodo periode pertama salah satunya adalah memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak WNI yang berkerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan kerap mengalami banyak permasalahan. Perlindungan yang diberikan pemerintah adalah perlindungan hak, bantuan hukum, penanganan permohonan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, mengadakan konsultasi bagi WNI dan BHI di luar negeri, mendampingi WNI bermasalah, penyampaian informasi perkembangan kasus, bantuan pemulangan WNI bermasalah, dan bantuan pemulangan jenazah WNI ke daerah asal (Kementerian Luar Negeri RI). Pilar ini berfokus dengan membuktikan kehadiran kementerian luar negeri di setiap negara terutama terkait buruh migran. Perlindungan dan bentuk kepedulian pemerintah saat itu dibuktikan bahwa selama empat tahun kepemimpinan Joko Widodo mampu membebaskan 443 WNI dari ancaman hukum pidana mati dan tercatat bahwa terdapat 51.088 kasus WNI yang telah diselesaikan, 16.432 WNI telah dievakuasi dari daerah konflik dan bencana alam, serta repatriasi 181.942 WNI karena bermasalah. Pemerintah juga melakukan pembebasan terhadap 39 WNI yang disandera, salah satunya adalah WNI yang disandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina dan WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata di Benghazi, Libya. Selama empat tahun terakhir, pemerintah juga telah mengembalikan sekitar Rp. 408 miliar hak finansial WNI (CNN, 2018).

Beberapa data diatas membuktikan keberhasilan dan kehadiran pemerintahan Jokowi saat itu dalam menjalankan kebijakan luar negerinya yang terfokus pada perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.

2.1.4. Kerja sama ASEAN

Meskipun beberapa politik luar negeri di era Joko Widodo kerap dianggap *inward looking* atau ke dalam, namun hal tersebut tidak menghilangkan kepentingan Indonesia di kawasan terutama ASEAN. Fokus Indonesia pada organisasi ini yaitu meningkatkan keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama di kawasan. ASEAN memiliki tiga peran strategis bagi Indonesia, yakni *regional economic powerhouse*, *power broker*, dan pilar penyangga perdamaian (Rosyidin, 2019). Secara ekonomi ASEAN sangat berpotensi menjadi kekuatan ekonomi regional di masa yang akan datang. Perdagangan intra-ASEAN merupakan yang terbesar dibandingkan perdagangan dengan negara-negara di luar ASEAN. 40 persen investasi ASEAN juga ditanamkan di Indonesia, 720 perusahaan Indonesia juga telah beroperasi di negara-negara ASEAN (Marsudi, 2017). Melihat hal tersebut tentu Indonesia memanfaatkan ASEAN sebagai tujuan ekspor dan pengembangan ekonomi. Peran strategis kedua yaitu sebagai *power broker*. ASEAN seakan mampu menjadi “penengah” diantara kekuatan-kekuatan besar di dunia. ASEAN menjaga sinergi untuk tetap menjaga kekuatan secara regional tanpa memberhentikan hubungan dengan mitra yang lebih luas. Dengan kemampuan ini ASEAN mampu menjadi sentralitas dan menurunkan ketegangan di antara kekuatan negara-negara besar. Meski begitu ASEAN masih dianggap sebagai institusi yang lemah, banyak konflik di kawasan yang tidak bisa diselesaikannya sendiri. Di balik itu, ASEAN kemudian mampu membuat terobosan untuk membuat Komunitas Keamanan ASEAN. Dengan peran strategis tersebutlah yang kemudian mampu menjadi pendorong dan faktor perlindungan bagi Indonesia dalam menghadapi gempuran kekuatan negara-negara besar dan kondisi internasional yang tidak menentu.

Beberapa bentuk kerjasama maritim Indonesia di ASEAN adalah upaya Indonesia untuk terus mendorong dan meningkatkan kerjasama keamanan maritim, terutama dalam penyelesaian masalah *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* (IUUF). Tujuan utama tindakan ini adalah meningkatkan peran Indonesia serta sentralitas di ASEAN. Selain itu, pada tahun 2015 Indonesia merupakan negara pendorong implementasi *EAS Statement on Enhancing*

Regional Maritime Cooperation . Dalam isu penanggulangan bencana, Indonesia juga merupakan negara yang melakukan inisiasi tentang *Declaration on One ASEAN, One Response* yang disepakati oleh negara anggota ASEAN. Indonesia juga turut memberikan perannya dalam memastikan sentralitas ASEAN, contohnya adalah turut aktif dalam pembuatan *Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security and Stability in the Region* di tahun 2016 (Setnas Asean, 2019). Bentuk kerja sama lain juga dilakukan tiga negara dalam proyek infrastruktur Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, proyek ini bertujuan untuk membangun ekonomi ketiga negara. Melalui Kementerian Perhubungan, Indonesia juga melakukan kerja sama regional untuk meningkatkan konektivitas maritim di ASEAN. Salah satunya adalah melalui kerjasama yang dilakukan beberapa negara yaitu, Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA). Hal ini berperan sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan pembangunan ekonomi Negara anggota (Dephub, 2018).

Meski begitu, apabila disesuaikan dengan visi PMD yang dicanangkan pada era kepemimpinan Jokowi, Indonesia lebih condong ke kawasan Indo-Pasifik dibanding Asia Tenggara. ASEAN dipandang kurang akomodatif, di mana ASEAN dilihat sebagai institusi yang lemah sehingga akan kurang bisa memperkuat kebijakan luar negeri Indonesia. Dibalik segala kekurangan dan kelemahan ASEAN secara kelembagaan, ada satu budaya yang kemudian tidak dimiliki negara lain, yaitu budaya damai. Budaya damai yang dimiliki ASEAN itulah yang mampu menjadi penepis ketegangan negara-negara di kawasan sehingga kemudian bisa menjaga stabilitas nasional Indonesia di kawasan.

2.1.5. Diplomasi Maritim

Pilar terakhir dalam orientasi kebijakan luar negeri Jokowi adalah diplomasi maritim. Diplomasi maritim merupakan negosiasi yang dilakukan antar negara terkait kerjasama kemaritiman dan penyelesaian permasalahan perbatasan laut dan darat (Kemlu, 2015). Pada akhirnya tujuan dari diplomasi ini adalah untuk mengoptimalkan serta mengembalikan sumber daya laut sebagai identitas Indonesia adalah negara laut dan menyelesaikan konflik terkait perbatasan laut

dengan negara-negara yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, diplomasi maritim digunakan untuk mendorong pencapaian visi Poros Maritim Dunia, sehingga kemudian dirumuskan pada 4 pilar pelaksanaannya, yaitu, membangun kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, serta pelaksanaan diplomasi maritim untuk menghilangkan sumber konflik di laut. Pada era Jokowi kerap sekali dikenal dengan pembangunan infrastruktur laut, salah satunya adalah pembangunan tol laut. Tol ini bertujuan untuk memudahkan perpindahan bahan pokok yang kemudian menunjang turunnya harga-harga barang pokok di wilayah Indonesia yang sulit dijangkau. Agus Purnomo, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan bahwa pembangunan rute tol laut tiap tahunnya bertambah. Pada 2016, jumlah rute tol laut hanya enam trayek, 2017 sebanyak 13 trayek, pada 2018 hingga 2019 sebanyak 18 trayek. Hal ini mengakibatkan disparitas harga bisa ditekan salah satu contohnya adalah harga beras turun 14 persen di Anambas, harga semen turun 14 persen di Rote, dan 20 persen di Waingapu. Hal ini tentunya menjadi pijakan baru bagi perekonomian Indonesia dan keberhasilan era Jokowi dalam memperbaiki konektivitas maritim.

Lima pilar diatas merupakan arah kebijakan Jokowi secara umum pada periode pertama. Berdasarkan tinjauan pelaksanaan dan secara konsep hampir seluruhnya mementingkan kepentingan domestik dan mengindikasikan arah politik luar negeri Jokowi memang *inward-looking*. Meskipun tetap terlihat bentuk kerja sama yang seakan mementingkan hubungan luar negeri, kerja sama tersebut berakhir pada kepentingan domestik. Minimnya kehadiran Jokowi dalam setiap penyelenggaraan sidang umum PBB memberikan kesan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia memang lebih memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Selain dari lima pilar diatas, Jokowi juga mencanangkan visi besarnya yang diangkat pada awal kepemimpinannya, yaitu menjadikan Indonesia sebagai PMD. Namun, dalam pelaksanaannya, visi tersebut menimbulkan kritik. Aaron Connely (2015) menilai bahwa kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo menjadi kurang jelas, tidak berwawasan damai, kurang kooperatif dan justru menjadikan Indonesia menjauh dari Asia Tenggara dan Dunia. Connely menilai bahwa ada

pertentangan wacana nasionalistik yang dibawa Jokowi dan justru fokus kepada kekuatan negara serta visinya.

Meski banyaknya kritik dalam pelaksanaan politik luar negeri Jokowi di periode pertama, terdapat 4 poin yang menjadi sorotan dan perkembangan politik luar negeri Joko Widodo pada 5 tahun kepemimpinan (Rosyidin, 2019). Poin pertama, adanya perubahan orientasi kebijakan luar negeri Jokowi-JK setelah 3 tahun masa pemerintahannya, ketika sebelumnya politik luar negeri Jokowi dianggap terlalu *inward-looking* namun pada tahun ketiga keterlibatan Indonesia pada forum-forum internasional meningkat. Indonesia berubah peran bukan lagi sebatas kehadiran dan keterlibatan tapi lebih dari itu Indonesia mampu menjadi *agenda setter*. Poin kedua, dalam hal strategi diplomasi, kebijakan luar negeri Jokowi cenderung pada hubungan bilateralisme dibanding multilateralisme. Jokowi terlalu dilandasi oleh pemikiran pribadinya yang pragmatis, praktis, dan berorientasi pada hasil. Sehingga multilateralisme dianggap terlalu banyak menghabiskan waktu dan membutuhkan perdebatan yang lama. Ketiga, ketepatan dalam memilih wilayah Indo-Pasifik sebagai sorotan kebijakan luar negerinya. Hal ini dinilai tepat karena Indo-Pasifik merupakan kawasan bersaing negara-negara besar saat itu, meskipun Indonesia seakan terlihat mengabaikan ASEAN. Poin terakhir, Indonesia tidak kehilangan identitas sebagai pencipta perdamaian, malah pada kepemimpinannya Jokowi memperbesar peran identitas sebagai negara Muslim terbesar di kancah Internasional (Rosyidin, 2019).

Melihat banyaknya data di atas membuktikan bahwa orientasi politik luar negeri Indonesia masa pemerintahan Joko Widodo banyak memberikan perubahan dan perkembangan bagi Indonesia, namun tidak banyak juga bahwa banyak strategi dan pendekatan diplomasi yang terkesan kurang tepat dan kurang maksimal.

2.2 Poros Maritim Dunia

PMD merupakan visi baru bagi Indonesia. Visi ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Vietnam untuk pertama kalinya pada tahun 2014. PMD merupakan konsep yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur.

Hal tersebut diimplementasikan dengan pengembalian identitas Indonesia sebagai negara maritim, meningkatkan keamanan maritim, dan mengelola sumber daya maritim secara berkelanjutan. Menurut Rizal Sukma (2014), PMD di definisikan menjadi tiga hal. Pertama PMD merupakan visi dan cita-cita Indonesia. Kedua, PMD di lihat sebagai doktrin dimana Jokowi mengajak Indonesia untuk melihat negaranya sebagai kekuatan diantara dua samudera. Ketiga, PMD merupakan suatu yang nyata dan merupakan agenda yang akan dilaksanakan. PMD adalah konsep dimana suatu negara melakukan pengelolaan dan pemberdayaan sumber laut, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas laut sebagai fokus utama untuk menghubungkan pelabuhan Indonesia dari barat hingga timur, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim sebagai negara yang terletak di antara dua samudera (The Jakarta Post, 2014). Dengan kondisi Indonesia yang strategis tersebut mendorong Indonesia untuk menciptakan strategi yang komprehensif untuk mengoptimalkan kekuatan maritimnya.

Pendapat lain mengatakan bahwa PMD adalah visi dengan konsekuensi dimana Indonesia harus membenahi negaranya dulu secara domestik agar terlihat layak untuk mengatur sektor maritim selanjutnya. Sebelum mencapai sesuatu yang besar, Indonesia harus terlebih dahulu mampu menjadi poros di tingkat regional dan meningkat ke level internasional (Herindrasti, 2014). Sedangkan Pertiwi (2014) menilai bahwa kekuatan maritim Indonesia bisa menguat apabila adanya peningkatan dalam sektor ekonomi. Peningkatan kekuatan laut akan memberikan dampak pada keamanan perairan dan wilayah. Sehingga dari beberapa pendapat akademisi tersebut, pada akhirnya konsep ini bersifat *inward looking* dan tetap menempatkan kepentingan domestik menjadi fokus utama. Dengan kondisi Indonesia yang berbentuk Kepulauan dengan kekayaan dan kepentingan maritim yang kemudian PMD diwujudkan sebagai bentuk daya tarik Indonesia bagi dunia internasional karena pertumbuhan ekonomi terbesar salah satunya adalah sektor maritim. Sektor ini memberikan efek yang besar terutama kesejahteraan, keamanan dan menjaga stabilitas perdagangan laut secara global. Hal ini disebabkan karena jalur utama pelayaran di Asia Tenggara seperti Selat

Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Makasar, dan Selat Lombok juga merupakan jalur pelayaran vital bagi dunia (Harry dan Arfin, 2016).

Poros maritim juga dapat dilihat sebagai sebuah visi atau cita-cita. Gagasan ini merupakan pijakan dan ajakan untuk mengembalikan identitas Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, dimana memiliki kekuatan maritim yang bersatu (*unity*), sejahtera (*prosperity*), dan berwibawa (*dignity*). Di sisi lain, poros maritim juga dapat dianggap sebagai sebuah doktrin, yang memberi arahan mengenai sebuah tujuan. Dari pernyataan tersebut Rosyidin (2019) memberikan kesimpulan bahwa PMD dianggap sebagai sebuah tujuan dan cara atau strategi. PMD juga disampaikan sebagai sebuah doktrin bahwa hal tersebut merupakan konsep dari kekuatan di antara dua samudera. Meski begitu definisi PMD menimbulkan perbedaan definisi di kalangan akademisi. Kelompok pertama mendefinisikan poros sebagai sumbu atau pusat, sehingga PMD di definisikan sebagai pusat aktivitas kelautan Indonesia atau *Global Maritime Fulcrum*. Kelompok kedua mendefinisikan poros sebagai penjajaran atau kelompok baru, sehingga Indonesia ingin menunjang posisi strategis untuk mencapai kepentingan nasionalnya atau *Global Maritime Axis*. Sedangkan definisi ketiga adalah poros sebagai jalur pelayaran maritim, dimana visi ini ingin menguasai jalur pelayaran maritim dunia yang melewati Indonesia atau *Global Maritime Nexus* (Suropati, 2016).

Pada dasarnya ada dua hal yang mempengaruhi Indonesia berani untuk menggagas visi besar tersebut. Pertama, karena adanya faktor geografis dan tata letak wilayah Indonesia, dimana wilayah perairan Indonesia lebih luas dibanding daratannya dan terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kedua, karena faktor sejarah dimana kerajaan Indonesia dulu sangatlah kuat dalam kekuatan maritimnya, yaitu kerajaan Majapahit dan Sriwijaya serta semboyan “Nenek moyangku seorang pelaut”. Hal ini menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki jiwa bahari yang akan “hidup dengan dan dari laut” (Kadar, 2015). Kejayaan Sriwijaya dalam membangun pelabuhan besar di Asia Tenggara dan kekuatan Majapahit dengan lima armada kapalnya menjadi sebuah pijakan sejarah yang menjelaskan kejayaan maritim Indonesia (Supriyanto 2016).

Pijakan sejarah itu yang melandasi Indonesia untuk mengembalikan budaya nusantara. Presiden Jokowi mengatakan dengan kondisi geografis, ekonomi dan politik Indonesia yang strategis, Indonesia akan memberikan peran dan memposisikan diri sebagai tumpuan maritim secara global (The Jakarta Post, 2014). Jalur laut menjadi suatu hal yang strategis bagi sebuah negara, Sir Walter Raleigh pernah mengatakan bahwa siapa yang mampu menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Siapa yang mampu menguasai perdagangan dunia akan menguasai kekayaan dunia. Sedangkan siapa menguasai kekayaan dunia akan menguasai dunia. Melihat pernyataan tersebut, konsep negara untuk menguasai maritim tidak hanya dicanangkan oleh Indonesia. Terdapat empat konsep maritim kekuatan maritim yang juga dicanangkan oleh negara di dunia, yaitu Indo-Pasifik (India dan Jepang) pada tahun 2007, *Rebalancing toward Asia* (Amerika Serikat dan Indonesia) di tahun 2011, Jalur Sutra Maritim (Tiongkok) di tahun 2013, dan Poros Maritim Dunia (Indonesia) di tahun 2014, hal tersebut menjadi bukti adanya persaingan politik Internasional untuk saling menguasai akses rute dan jalur pelayaran, pasar dan sumber daya alam di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Negara-negara tersebut memiliki kekuatan nasional yang kuat dan mampu bersaing secara militer, ekonomi, dan teknologi di level regional bahkan global.

Dalam pelaksanaannya tentu terdapat hambatan dan tantangan secara internal dan eksternal bagi terwujudnya PMD. Pada hambatan internal masih terdapat masalah manajerial dan operasional dalam instansi kelautan. Tumpang tindihnya tupoksi antar instansi pengelola sumber daya dan masih tingginya ego dan kepentingan antara instansi pengelola sumber daya maritim. Hal tersebut terbentuk karena adanya rasa keinginan untuk mempertahankan dan memperkuat eksistensi instansi masing-masing (Latifah dan Dinda, 2018). Sedangkan menurut Jamaluddin (2014), Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hasanuddin Makasar, masalah internal Indonesia yang lain dan akan menghambat pencapaian tersebut adalah sumber daya manusia yang lemah dan lemahnya teknologi terkait maritim dalam mengelola sumber daya laut. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan sehingga terpisah oleh perairan membuat konektivitas

antar wilayah sangat minim, sehingga pembangunan ekonomi maritim juga minim.

Selanjutnya mengenai tantangan eksternal yang dihadapi Indonesia adalah maraknya tindakan perompakan, pembajakan, pelanggaran batas negara dan pencurian ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia (Rustam 2016). Tindakan ini tentu menjadi penghambat Indonesia untuk mewujudkan visi PMD karena situasi kelautan Indonesia yang tidak aman. Hal tersebut menyebabkan peningkatan biaya operasional bagi kapal karena harus melakukan upaya lebih yaitu memutar jalur pelayaran untuk melakukan pengamanan wilayah. Selanjutnya mengenai masalah perbatasan, menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Indonesia tergolong masih memiliki banyak permasalahan mengenai perbatasan laut dengan beberapa negara. Pelanggaran batas negara yang sering terjadi di Indonesia menjadi permasalahan penting karena mengancam kedaulatan dan stabilitas keamanan laut Indonesia. TNI AL mencatat bahwa pada tahun 2007 dan hanya dalam kurun waktu setahun terdapat 94 kasus pelanggaran oleh kapal perang Malaysia yang melewati batas wilayah perairan Indonesia (Usman dan Isnawita 2009, dalam Rustam 2016). Sedangkan terkait tindakan *illegal fishing*, di perairan Natuna, Tiongkok kerap berupaya untuk menggagalkan patroli Indonesia menangkap nelayan ilegal. Hal ini menunjukkan adanya kondisi yang tidak aman di perbatasan laut dan berpotensi akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara bersangkutan (CSIS, 2018). Hal ini tentunya akan menjadi masalah serius di bidang eksternal dalam mencapai visi PMD. Selain permasalahan tersebut tentu tantangan dan hambatan lainnya adalah munculnya persaingan geopolitik di kawasan. Dengan terbukanya perairan nusantara, tentunya itu menjadikan ancaman bagi negara-negara besar, terkait jalur perdagangan dan keamanan pasokan negara-negara seperti Jepang dan Tiongkok, mengingat bahwa jalur perairan Indonesia sangatlah strategis.

Pada akhirnya gagasan PMD bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa pelaut atau dikenal dengan semboyan *Jalasveva Jayamahe* yang berarti di laut kita jaya. Meski gagasan PMD masih menuai kritik dan dirasa belum optimal, namun tidak dipungkiri bahwa gagasan ini

menggerakkan Indonesia beberapa langkah kedepan. Dalam mencapai gagasan tersebut, Joko Widodo kemudian meningkatkan posisi maritim Indonesia melalui diplomasi maritim.

2.3 Implementasi Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim adalah salah satu pilar sebagai upaya Indonesia untuk mewujudkan PMD dan berperan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Diplomasi maritim adalah sebuah kebijakan luar negeri Indonesia yang dilandasi oleh identitas sebagai negara maritim atau negara kepulauan serta difokuskan pada bidang-bidang yang terkait dengan maritim (Rosyidin, 2019). Diplomasi maritim ditujukan untuk menangani sumber konflik di laut. Konflik tersebut terdiri dari pencurian ikan ilegal, pelanggaran batas dan sengketa wilayah, pembajakan serta polusi yang terjadi di laut. Diplomasi maritim merupakan negosiasi yang dilakukan oleh negara untuk menciptakan kerjasama maritim demi menyelesaikan permasalahan perbatasan di laut dan darat (Kemlu, 2015). Dalam pelaksanaannya terdapat 4 pilar untuk melakukan diplomasi ini. Pertama, membangun kembali budaya maritim. Pilar ini berupaya untuk melakukan pengelolaan dan pemberdayaan maritim secara optimal dan berkelanjutan. Kedua, memanfaatkan sumber daya laut. Ketiga, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim. Keempat, mengembangkan hubungan kerja sama di bidang maritim untuk menyelesaikan konflik di laut.

Pembangunan kembali budaya maritim meliputi beberapa aspek seperti, perubahan paradigma dan cara pandang pada masyarakat, perubahan perilaku dan budaya terkait maritim, pengembangan sumber daya melalui pengembangan UMKM, ilmu pengetahuan, dan teknologi maritim. Sedangkan menjaga dan mengelola sumber daya laut meliputi beberapa aspek seperti pengaturan ruang laut, kualitas sumber daya laut seperti mineral dan gas laut, perikanan dan potensi ekonomi baru seperti jasa, wisata, industri maritim, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dan *biodiversity*. Ketua Yayasan Penelitian Habibie Center, Sofian Effendi, mengatakan bahwa poros maritim terhadap PDB hanya menyumbang 7% dari jumlah total, padahal potensi perekonomian Indonesia adalah di bidang maritim. Hal ini membuktikan bahwa pilar diplomasi maritim dalam pengelolaan sumber

daya maritim masih sangat minim. Kurangnya fasilitas seperti kapal bagi nelayan tidak memadai, juga penyebab karena timpangnya jumlah nelayan serta pelaku usaha pengelolaan ikan. Pelaksanaan untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM dalam bidang maritim seharusnya sudah bisa mencapai tingkat ekspor bukan lagi domestik atau daerah, sehingga yang diharapkan adalah adanya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain pengelolaan sumber daya, pengembalian budaya maritim seperti gerakan makan ikan juga menjadi salah satu bentuk pelaksanaan diplomasi maritim untuk mencapai PMD. Namun, nilai konsumsi ikan Indonesia masih tergolong rendah, yaitu sebanyak 49-50 kilogram per kapita. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan negara lain yang angka konsumsi ikannya ditargetkan sebesar 70-80 kilogram per kapita, bahkan Jepang menargetkan 100 kilogram (Kompas, 2019).

Diplomasi maritim merupakan pelaksanaan peran Kementerian Luar Negeri dalam mencapai visi Poros Maritim yang diimplementasikan dengan pembangunan sektor laut untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Menlu Retno Marsudi menerjemahkan visi dengan melakukan diplomasi maritim yang kuat melalui pelaksanaan perundingan wilayah laut dan darat, memberikan rekomendasi di bidang maritim, mengelola perbatasan, dan pembentukan forum kerjasama maritim (CSIS, 2018). Sedangkan dalam upaya pembangunan kelautan diimplementasikan dengan pembangunan tol laut, *deep sea port*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata di sektor maritim. Upaya tersebut dilakukan bertujuan untuk memperluas kerjasama dan investasi asing guna menggerakkan dan mendorong perekonomian rakyat secara langsung. Salah satunya adalah pembangunan tol laut di beberapa pulau utama, pembangunan pelabuhan, penyediaan kapal penangkap ikan, dan melakukan perombakan pada sistem perdagangan ikan dan sumber daya manusia. Upaya-upaya tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai PMD. Tujuan awal pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menyeimbangkan perbedaan harga yang signifikan di pusat dan di daerah. Dengan begitu bisa menjadi cara untuk meningkatkan perekonomian Indonesia sebesar 7% sesuai dengan visi Jokowi di awal kepemimpinannya. Namun dalam pelaksanaannya dari total dana yang

dibutuhkan yaitu sebesar US\$ 412 miliar, pemerintah hanya memiliki dana setengah dari total. Sedangkan menggantungkan sisa pendanaanya oleh *Asia Infrastructure and Investment Bank* (AIIB). Tentu hal ini menjadi kekhawatiran dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya terkait pembangunan infrastruktur. Pilar keempat mengenai diplomasi maritim diwujudkan melalui beberapa aspek pendukung seperti perundingan dan perbatasan, kerja sama regional dan internasional, diplomasi melalui budaya, bahasan dan wisata maritim.

Diplomasi maritim Indonesia dioperasionalkan melalui tiga dimensi, yaitu kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan (BPPK Kemlu, 2015). Dimensi kedaulatan dilihat melalui kondisi kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Pelaksanaan ini bertujuan untuk mendukung kedaulatan maritim. Upaya yang dilakukan seperti dengan beberapa cara seperti perjanjian, perundingan, dan melakukan penguatan kemandirian maritim serta peningkatan pembangunan di kawasan laut salah satunya dengan mengoptimalkan hukum maritim. Sedangkan dalam dimensi keamanan, upaya ini dilakukan untuk menciptakan stabilitas keamanan di perairan Indonesia. Dikarenakan munculnya banyak ancaman yang terjadi, dimensi ini akan berpotensi untuk mengganggu keamanan dan kepentingan nasional. Kerjasama keamanan maritim dilakukan di wilayah regional dan multilateral. Negara-negara dalam suatu kawasan biasanya akan memiliki kepentingan yang serupa, yaitu mengamankan jalur pelayaran. Sedangkan di tingkat multilateral, Indonesia mengutamakan isu kejahatan transnasional seperti peran aktif Indonesia dalam *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *International Maritime Organization* (IMO), dan *Bali Process*. Namun, upaya diplomatik yang dilakukan hingga dua sampai tiga tahun ke depan cenderung berfokus pada *Indian Ocean Rim Association* (IORA) dengan asumsi Indonesia menjadi ketua IORA pada 2015. Aktifnya Indonesia pada forum ini bertujuan untuk memperluas pengaruh hingga ke Samudera Hindia. Perubahan orientasi dari pengaruh di Samudera Pasifik ke Hindia merupakan langkah awal perluasan konektivitas Indonesia. Untuk itu, Jokowi mendorong untuk melakukan kerjasama maritim yang lebih komprehensif di Samudera Hindia. Hal tersebut dilakukan melalui masuknya Indonesia ke dalam *Indian Ocean Rim Association*

(IORA) sebagai satu-satunya organisasi regional di kawasan Samudera Hindia (Maulana dan Heavy, 2018).

Kerja sama yang dilakukan melalui organisasi ini terkait peningkatan enam pilar yaitu isu keamanan maritim, peningkatan perdagangan dan investasi bisnis, manajemen perikanan, manajemen resiko bencana alam, kerja sama akademis dan ilmu pengetahuan serta kerja sama dalam sektor pariwisata dan budaya (Jakarta Concord, 2017). Kerja sama di tingkat kawasan ini bertujuan untuk meningkatkan posisi Indonesia dan melebarkan pengaruh di kawasan. Hal lain yang tentunya ingin dicapai terkait kemaritiman adalah memperluas konektivitas, agar Indonesia tidak berhenti hanya dalam pembangunan domestik namun juga dengan negara-negara anggota di IORA. Diplomasi maritim dilakukan untuk mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Agenda diplomasi maritim dilaksanakan di berbagai kerjasama mencakup penyelesaian masalah perbatasan Indonesia, penjaminan integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan serta kesejahteraan pulau-pulau terdepan, diplomasi pertahanan, dan menurunkan persaingan maritim antar negara dan mendorong penyelesaian sengketa teritorial (Visi Misi Jokowi-JK, 2014). Selain itu, diplomasi maritim juga dilakukan untuk mencapai kepentingan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik (Agastia & Perwita, 2015, p. 36).

Diplomasi Maritim menjadi cara dan konsep dalam mencapai gagasan PMD, cara yang digunakan terkait pengelolaan sumber daya maritim, peningkatan kerja sama regional dan kawasan, serta peningkatan konektivitas maritim, serta diplomasi maritim dalam penyelesaian konflik di kawasan.

2.4 Kesimpulan

Pada bab kedua ini terbagi menjadi 3 subbab utama. Subbab pertama mengenai politik luar negeri Jokowi secara umum yang dianggap sebagai kebijakan ke dalam atau *inward looking* dibuktikan dengan gagasan yang dicanangkan. Subbab kedua menjelaskan mengenai gagasan besarnya untuk menjadikan Indonesia sebagai PMD, dan di subbab ketiga membahas mengenai Diplomasi Maritim sebagai cara untuk mencapai PMD. Politik luar negeri Jokowi secara umum dibagi dalam 5 pilar. Keamanan dan perdamaian, diplomasi

ekonomi, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI), kerja sama *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dan diplomasi maritim untuk mencapai gagasan besarnya menjadikan Indonesia sebagai PMD.

Kebijakan luar negeri pada masa pemerintahannya dianggap berbeda dari presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih tertarik terkait dunia internasional. Periode pertama Jokowi juga sering diwarnai dengan absennya Indonesia dalam forum internasional, meski begitu gagasan besarnya untuk menjadikan Indonesia sebagai PMD membuat Indonesia seakan maju beberapa langkah. Meskipun pada pelaksanaannya konsep itu dianggap abstrak dan kurang optimal namun secara konseptual tujuannya adalah mengembalikan budaya maritim Indonesia seperti slogan “nenek moyangku seorang pelaut” dan “jalesveva jayamahe” untuk diangkat kembali. Diplomasi maritim menjadi cara untuk mencapai PMD yang terbagi pada 4 pilar, yaitu membangun kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dan mempererat hubungan kerja sama di bidang maritim untuk menghilangkan konflik di laut. Pada akhirnya diplomasi maritim memiliki fungsi penting yaitu mempercepat penyelesaian sengketa perbatasan laut Indonesia dengan beberapa negara. Masalah ini merupakan urgensi utama karena terkait dengan keamanan keamanan dan integritas kedaulatan wilayah Indonesia (Kementerian Luar Negeri RI, 2015). Peran Indonesia di kawasan sebagai upaya melakukan diplomasi maritim juga meluas hingga ke Hindia melalui IORA dengan misi yang selaras dalam menyelesaikan konflik. Peningkatan citra dan perluasan konektivitas menjadi jalan untuk memperluas *power* dan meningkatkan perkembangan pencapaian PMD.

